



Analysis of International Disputes Regarding Diplomatic Relations between Saudi Arabia and Qatar

Fadli Nur Wana Kurniawan

Masyarakat Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia,

YOGYAKARTA, INDONESIA

✉ fadlikurniawan@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of International Disputes Between Saudi Arabia and Qatar (Situation of Diplomatic Relations between the two countries) Abstract: Diplomatic relations by definition are relations with the mediation between representatives of two or more countries that are political in nature. In the international world, each country must have diplomatic relations with other countries, in establishing relations or interactions do not always go well, sometimes it will lead to international disputes such as those between Saudi Arabia and Qatar, as an outline of the dispute between the two countries, is caused by Saudi Arabia's view of Qatar which does not respect the gulf state's attitude, namely anti-Iran's attitude by supporting to assist Iranians and militant groups such as Muslim Brotherhood and others. The Gulf especially Arabs and made Arabs issue policies to cut off diplomatic relations with Qatar, this paper will discuss the general picture of the two countries and the history of relations between the two countries. Arabian conduct along with Qatar's response to this matter to efforts to reconcile the two countries by various parties Keywords: Diplomatic Relations, Saudi Arabia, Qatar, Disputes

KEYWORDS: Diplomatic Relations, Saudi Arabia, Qatar, Disputes

ABSTRAK

Hubungan Diplomatik secara definisi bebas adalah hubungan dengan perantara perwakilan antara dua negara atau lebih yang bersifat politik, Dalam

dunia internasional tiap negara pasti memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain, dalam menjalin hubungan atau interaksi tidak selalu berjalan baik terkadang akan berujung persengketaan internasional seperti yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar, secara garis besar persengketaan kedua negara disebabkan anggapan Arab Saudi terhadap Qatar yang tidak menghargai sikap negara Teluk yaitu sikap anti Iran dengan mendukung hingga membantu Iran serta kelompok-kelompok militan seperti Ikhwanul Muslimin dan lain-lain, hal tersebut memicu kemarahan Negara Teluk khususnya Arab dan membuat Arab mengeluarkan kebijakan memutuskan hubungan diplomatik nya dengan Qatar, pada tulisan ini akan dibahas mengenai gambaran umum kedua negara serta sejarah hubungan kedua negara, Faktor Penyebab Persengketaan keduanya juga bentuk pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab beserta respon Qatar terhadap hal tersebut hingga upaya-upaya untuk mendamaikan kedua negara oleh berbagai pihak.

KATA KUNCI: Hubungan Diplomatik, Arab Saudi, Qatar, Sengketa

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri Hubungan antar negara dalam dunia internasional tidak selalu berjalan baik dan harmonis terkadang tercipta suatu perselisihan atau pergolakan yang dalam Hukum Internasional disebut dengan Persengketaan Internasional. dalam persengketaan internasional, Hukum International harus mampu dapat digunakan untuk mengelola dan menyediakan metode penyelesaian konflik atau persengketaan internasional. karena jika dipahami tujuan paling mendasar dari hukum internasional adalah menciptakan dan memelihara perdamaian dalam masyarakat serta melakukan harmonisasi kepentingan didalam masyarakat internasional Sedangkan Hukum Internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional yang bukan bersifat perdata) Mochtar Kusumaatmadja membagi makna hukum internasional menjadi dua bagian, yakni hukum internasional perdata dan hukum internasional publik. Hukum internasional

perdata adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara¹

Persengketaan Internasional atau sengketa internasional secara singkat merupakan suatu perselisihan antar pihak-pihak atau subjek internasional mengenai fakta politik, hukum, serta lain-lain diman tuntutan pendapat atau argumentasi dari pihak yang satu dilanggar disimpangi atau bahkan dituntut balik oleh pihak yang lain atau dapat juga diartikan sebagai suatu ketidaksesuaian yang berkaitan dengan ketentuan hukum atau keadilan atau kepentingan antara dua pihak atau lebih dalam masyarakat internasional

John G. Merrills memahami suatu persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya. maka secara definisi bebas sengketa internasional dapat diartikan sebagai perselisihan pendapat antara dua subjek internasional atau lebih mengenai fakta, hukum atau politik dimana argumentasi satu pihak ditolak dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain juga dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian pendapat antara kedua belah pihak atau lebih yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak sengketa. Persoalan yang timbul adalah apa yang bisa dijadikan sebagai subjek persengketaan. Menurut John G. Merrills subjek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari sengketa mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan perbatasan²

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*).³

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm.1

² John G., 1991, *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge University Press. Penterjemah Achmad Fausan, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Tarsito

³ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.2

Persengketaan antara subjek internasional dalam hal ini negara bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya

1. Ketika suatu pihak atau lebih salah paham dengan suatu hal
2. Ketika suatu pihak sengaja atau tidak sengaja melanggar hak dan kepentingan dari pihak atau negara lain
3. Adanya suatu perselisihan pendirian tentang suatu hal
4. Dilanggarnya hukum atau perjanjian internasional.

Sengketa internasional dapat berupa sengketa politik yaitu sengketa yang berkaitan dengan hubungan politik atau diplomatik antara dua negara juga bisa berupa sengketa hukum yang penyelesaiannya tentunya menggunakan upaya dan jalur hukum dan tentunya terdapat konsekuensi hukum apabila dilanggar. Dan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah persengketaan politik antara negara Arab Saudi dengan Qatar, dimana secara singkat hubungan diplomatik oleh kedua negara berlangsung panas. Pada dasarnya ketegangan hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar sudah berlangsung bertahun-tahun. Buntutnya adalah Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan internasional berupa pemutusan hubungan diplomatik dengan Negara Qatar. Berbagai bentuk tindakan dilakukan seperti berbagai embargo dan pemblokiran. Dalam persengketaan tersebut terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara ini. Sebelumnya dua minggu sebelum negara Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Qatar. Arab Saudi memblokir situs berita Qatar untuk diakses dinegaranya termasuk salah satunya stasiun televisi Al Jazeera. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara-negara yang termasuk Teluk. Dan pada 5 Juni 2017 Arab Saudi resmi mengeluarkan kebijakan Internasional yaitu memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar.

Sebenarnya secara garis besar penyebab Arab mengeluarkan kebijakan Internasional yaitu memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena, Arab menilai Qatar mengingkari komitmennya untuk mengharmoniskan dan mensinergikan kebijakan luar negerinya untuk menjalin hubungan baik dengan Kepentingan Arab

Saudi dan negara teluk lain. Dimana negara Qatar yang seharusnya sejalan dengan Negara di Kawasan teluk yaitu memerangi iran dan kelompok militan atau teroris , dianggap sebaliknya yaitu mendukung hingga membantu secara kongkrit pergerakan dan aktivitas negara Iran serta kelompok militan ⁴

Salah satu yang membuat ketegangan hubungan antara kedua negara ini yang berujung pemutusan hubungan diplomatik adalah adanya sebuah tulisan pada website qatar news agency yang menuliskan pidato emir qatar tamim bin hamad al thansaath dalam berita di website tersebut mengatakan emir qatar menganggap iran adalah sebuah kekuatan yang besar dalam stabilisasi kawasan teluk, emir qatar memuji negara iran dan beranggapan Iran merupakan kekuatan penting bagi wilayah teluk , selain itu dalam berita tersebut dikabarkan pula Qatar memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Donald Trump, Presiden USA.

Hal ini tentunya berseberangan dengan Negara Teluk termasuk Arab Saudi, Dimana Negara Teluk yang bersitegang dan kontra dengan Negara Iran, Namun Emir Qatar malah menganggap tindakan melawan iran bukan suatu hal yang menurutnya bijaksana, Emir Qatar secara jelas berdasar pidatonya mendukung kelompok yang dianggap terorisme yaitu kelompok Ikhwanul Mulimin, hamaz, hizbullah dan Israel, Qatar juga dinilai mengkritik kebijakan dan propaganda "anti iran" yang dimiliki oleh negara di kawasan teluk. Pernyataan-pernyataan tersebut sontak mendapat reaksi cukup keras dari Arab Saudi serta negara-negara yang berada di kawasan teluk lainnya, karena pernyataan Emir Qatar bertentangan dengan nilai-nilai yang dijaga oleh negara di kawasan teluk. Qatar mengeluarkan rilis sikap dan pernyataan sebagai respon atas pergolakan yang terjadi. Qatar bukan melawan meminta maaf atau lainnya , melainkan mengatakan bahwa Berita mengenai pidato Emir Qatar yang dibeitakan itu hoax atau tidak benar. Situs berita Qatar tersebut telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga pidato dari Emir Qatar yang asli dirubah, di modifikasi dan diarang menjadi palsu dan

⁴ Ramlan subakti. Memahami Ilmu Politik.(Jakarta : PT. Grasindo,2010), hlm 135

menjadi berita bohong, pidato yang diberitakan itu bukan pidato asli dari Emir Qatar. Pemerintah Qatar melalui Kemnluqri akan menyelidiki diretasnya situs media sosial QNA tersebut karena telah mengganggu hubungan diplomatik antara Negara Qatar dengan Negara yan berada dalam Kawasan Teluk termasuk Negara Arab Saudi. Namun Arab Saudi tanpa memperhatikan pembelaan yang dilakukan oleh Qatar langsung memutuskan Hubungan Diplomatik diantara keduanya. Melalui media Saudi , Arab saudi memberikan pernyataan sebagai berikut :“...*Qatar embraces multiple terrorist and sectarian groups aimed at disturbing stability in the region, including the Muslim Brotherhood, ISIS (Daesh) and Al Qaida.*”. diketahui Arab Saudi beserta bahrain da UEA juga pernah menarik duta besar mereka dari negara Qatar atas dasar anggapan dibantunya kelompok-kelompok militan oleh qatar , Qatar juga mendanai kelompok tersebut.

Setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, Arab Saudi bersama UEA, Bahrain dan Mesir mengeluarkan daftar sejumlah kelompok, tokoh dan institusi yang selama ini mendanai teroris. Dari daftar tersebut diketahui bahwa sebanyak 18 orang individu dan 5 institusi dari Qatar mendanai teroris. Dari daftar 18 orang individu itu termasuk anggota keluarga kerajaan Qatar yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Qatar, Abdullah bin Khalid Al Thani yang terlibat dalam pendanaan organisasi Al Qaeda. Tuduhan Arab Saudi terhadap Qatar terkait pendanaan terhadap kelompokkelompok terorisme adalah hal yang mudah dipatahkan dan diperdebatkan. Lewat korespondensi elektronik antara mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan ketua tim kampanye kepresidenan Hillary pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, John Podesta, yang dibocorkan oleh WikiLeaks, Qatar dan Arab Saudi disinggung sebagai pihak yang sama-sama memberikan dukungan keuangan dan logistik secara sembunyi-sembunyi kepada ISIS dan kelompok Sunni radikal lain di kawasan Teluk. Kemudian Arab Saudi sendiri merupakan pendukung milisi bersenjata yang saat ini memberontak di Suriah. Arab Saudi juga,

dengan paham Wahabi yang mereka miliki, dianggap punya peran besar dalam menyebarkan ideologi terorisme ke sejumlah negara.

Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan menutup perbatasan dengan Qatar baik jalur darat, laut dan udara. Lalu Arab Saudi memulangkanwarga negara Qatar dari wilayahnya dan menarik duta besar mereka yang berada di Qatar. Arab Saudi juga melakukan embargo terhadap penerbangan Qatar yaitu Qatar Airways. Penerbangan dari Arab Saudi seperti AirArabian, Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways menanggihkan penerbangan mereka ke dan dari Qatar. Qatar terpaksa mengalihkan penerbangan mereka ke Afrika dan Eropa melalui Iran.

Penerbangan di Iran melonjak menjadi 100 sampai 150 penerbangan setiap hari. Kemudian Arab Saudi memutuskan hubungan militer dengan Qatar dalam konflik Yaman. Terakhir Arab Saudi menutup kantor berita lokal Al Jazeera yang berada dinegaranya. Selain itu izin operasi media Al Jazeera pun dicabut oleh pemerintah Arab Saudi.⁴¹ Pasca pemutusan hubungan diplomatik, Arab Saudi bersama Bahrain dan UEA yang juga melakukan pemutusan hubungan diplomatik mengeluarkan 13 tuntutan kepada Qatar jika negara itu ingin mengakhiri krisis hubungan diplomatik yang tengah terjadi. Tuntutan yang diajukan antara lain untuk menutup stasiun TV Al Jazeera dan stasiun afiliasinya; menutup pangkalan militer Turki di Qatar; menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Iran dan sebagiannya. Qatar mengambil sikap yang tegas dengan menolak memenuhi setiap butir tuntutan yang diajukan kepada mereka karena telah mengganggu kedaulatan Qatar sebagai negara merdeka. Arab Saudi secara terang-terangan seolah mendikte urusan politik luar negeri Qatar menjadi seperti yang mereka inginkan, karena itu hingga saat ini krisis hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi serta negara-negara disekitarnya masih terus berlangsung.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Negara Arab Saudi

Tinjauan Umum Arab Saudi Daratan Arab Saudi terdiri dari padang berbatuan dan berpasir, dataran tinggi, pegunungan, dan sedikit dataran rendah. Tidak ada aliran sungai ataupun danau permanen. Arab Saudi terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Terletak di Semenanjung Arab di antara Laut Merah di sebelah barat (1.760 km) dan Teluk Arab di sebelah timur (560 km). Wilayah Arab Saudi menempati sekitar 4/5 semenanjung Arab atau seluas 2.250.000 km². Daratan Arab Saudi terdiri dari padang bebatuan dan berpasir, dataran tinggi, pegunungan, dan sedikit dataran rendah, tidak ada aliran sungai ataupun danau permanen. Tidak seperti kebanyakan negara Arab lainnya, Arab Saudi adalah negara yang independen dari kontrol Barat. Otonomi itu telah dicapai sebagian besar karena kekuatan militer pasukan Ikhwan radikal, prajurit gurun yang diorganisasi oleh Abdul al Aziz dan berdedikasi untuk mempromosikan Islam Wahhabi. Pada tanggal 23 September 1932, negara itu dinamai Kerajaan Arab Saudi, negara Islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa nasional dan Al-Qur'an sebagai konstitusinya.

Arab Saudi merupakan negara yang memiliki situs suci umat islam dunia, seluruh warga dunia dating ke Arab Saudi setiap tahunnya untuk berziarah dan melaksanakan ibadah haji, ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam jika sudah mampu. Kehidupan sehari-hari di Arab Saudi didominasi oleh kegiatan yang berlandaskan Islam. Arab Saudi mewajibkan seluruh warga negaranya untuk menjadi muslim, hukum yang berlakupun ialah hukum yang berdasarkan kepada hukum islam. Bentuk negara Arab Saudi adalah Monarki (kerajaan) dengan pemimpin Raja Salman bin AbdululAziz al-Saud yang telah di lantik menjadi raja pada tanggal 23 Januari 2015. Raja merangkap sebagai Perdana Menteri dan Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Arab Saudi. Raja Salman bin Abdulul Aziz Al-Saud merupakan anak dari Raja Abdulul Aziz dan

lahir pada 31 Desember 1935. Sistem Pemerintahan Arab Saudi adalah Negara Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan AlSunnah. Konstitusi Arab Saudi berdasarkan Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1992 ditetapkan Basic Law of Government yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Berdasarkan hukum Islam (Syariah) yang bersumber dari Kitab Suci AlQur'an & Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadikan system hukum utama dari Arab Saudi Ketika Kerajaan Arab Saudi modern didirikan pada tahun 1932, wilayah Semenanjung Arab adalah masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian dan perdagangan, terutama ekspor dan perdagangan tanggal yang dihasilkan oleh peziarah yang datang ke Mekkah dan Madinah. Ia tidak memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang dibayangkan oleh pendirinya, Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud. Penemuan minyak dalam jumlah komersial pada tahun 1938 mengubah itu. Segera setelah Perang Dunia II, ekspor minyak yang stabil menyediakan dana untuk membangun infrastruktur dasar jalan, bandara, pelabuhan laut, sekolah dan rumah sakit. Ekonomi pasar bebas Arab Saudi telah mengalami perubahan luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Disini masyarakat negara Saudi telah berevolusi dari masyarakat pertanian dasar menjadi kekuatan ekonomi regional dan global dengan infrastruktur modern Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan industri dan ekonomi. Kementerian Ekonomi merumuskan rencana pembangunan ekonomi dan sosial yang menetapkan tujuan ekonomi jangka panjang

B. Politik Luar Negeri Arab Saudi Sebagai Negara Islam

Tentu politik luar negeri Arab Saudi berkaitan erat dengan islam. Kebijakan yang diambil tentu berdasarkan dengan berpedoman kepada hukum-hukum islam. Secara historis politik luar negeri Arab

Saudi diatur oleh empat prinsip utama yaitu integritas territorial, perlindungan rezim, kemakmuran ekonomi dan promosi serta pelestarian bentuk pemerintahan islam monarki. Namun begitu perlindungan dari kekuatan global masih menjadi andalan dengan keterkaitannya dengan Inggris pasca Perang Dunia I sampai pendirian negara Arab Saudi pada tahun 1932. Serta kemitraan Arab Saudi dengan AS yang dijalin pasca Perang Dunia II hingga hari ini. Politik luar negeri Arab Saudi bisa dilihat dari beberapa fase yang ditandai dengan perkembangannya sebagai sebuah negara. Ideology Arab Saudi yang anti radikalisme dan kombinasi dari ciri-ciri wahabisme yang membentuk beberapa fase dalam politik luar negeri Arab Saudi, fase tersebut mempunyai keterkaitan dan merupakan dimensi-dimensi dari kebijaksanaan dan cita-cita islam.

Arab Saudi aktif menjalin hubungan bilateral dengan negara dan beberapa organisasi internasional seperti PBB, GCC, OKI dan organisasi lainnya. Sasaran utama dari politik luar negeri Arab Saudi saat ini ialah mendukung negara-negara Arab termasuk Palestina melawan Israel. Dukungan ini ditujukan untuk mencapai kedamaian dikawasan negara-negara Arab khususnya di Timur Tengah. Ideologi islam tidak hanya berfungsi sebagai alat politik luar negerinya tetapi juga semakin memperkuat otoritas Arab Saudi sebagai penegai nilai-nilai islam Pecahnya perang Arab – Israel tahun 1973 menyebabkan Arab Saudi melakukan embargo minyak ke negara-negara terkemuka yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia politik global. Pengaruh Arab Saudi yang semakin meningkat secara efektif menunjang bagi kepemimpinannya di dunia Arab.

Sedangkan hubungan Arab Saudi dengan negara barat seperti Inggris, Prancis dan Jerman Nampak semakin meningkat semakin berjalannya waktu dimana negara-negara tersebut merupakan pengekspor terbesar senjata bagi Arab Saudi. Arab Saudi juga tergabung dalam GCC yaitu The Gulf Cooperation Council dimana Arab Saudi juga merupakan salah satu negara pemimpin di GCC yang merupakan organisasi negara-negara teluk arab. Salah satu

keutamaan dibentuknya GCC ini ialah guna sebagai penjaga keamanan kawasan

C. Gambaran Umum Negara Qatar

Qatar masuk dunia Islam sejak Rajanya, Al-Munzir Ibnu Sawi Al-Tamimi memeluk Islam pada abad ke-7. Qatar sangat berperan dalam menyumbang perkembangan Islam. Dengan dipimpin oleh Abu al-Al'a al-Hadrami, armada angkatan laut Qatar merupakan armada yang paling hebat yang digunakan untuk mengangkut tentara ke berbagai wilayah. Kemerdekaan Qatar diberikan Inggris pada tanggal 3 September 1971 yang kemudian berada dibawah pimpinan keluarga Al-Thani. Qatar adalah sebuah semenanjung yang terletak di luar Arab Saudi di Teluk Arab. Luas wilayah Qatar mencakup 11.437 kilometer persegi. Budaya Qatar mirip dengan negara-negara lain di Arabia Timur, yang secara signifikan dipengaruhi oleh Islam.

Qatar dipimpin oleh seorang Emir, yaitu Syekh Hamad Bin Khalifa Al Thani. Syekh Hamad bin Khalifa Al Thani juga memiliki putera mahkota yang juga merupakan Wakil Emir yaitu Syekh Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani. Kepala pemerintahannya seorang Emir, yaitu Syekh Hamad Bin Khalifa Al-Thani dibantu oleh Perdana Menteri Syekh Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani merangkap juga sebagai Menteri Luar Negeri. Emir bertanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan semua hukum negaranya. Qatar telah menjadi negara dengan kekuatan finansial terbesar dalam beberapa tahun terakhir dengan pertumbuhan PDB tinggi di setiap tahunnya, tetapi harga minyak yang rendah telah mengurangi penghasilan PDB Qatar walaupun hanya sedikit. Qatar adalah satu-satunya anggota the Gulf Cooperation Council yang menghindari defisit anggaran pada tahun 2015, tetapi memiliki defisit \$ 12 miliar, 7,8% dari PDB pada tahun 2016. Keberhasilan Piala Dunia 2022 di Qatar yang juga sukses mempercepat proyek infrastruktur berskala besar seperti sistem metro, sistem kereta

ringan, pembangunan pelabuhan baru, jalan, stadion, dan infrastruktur olahraga terkait menunjukkan bahwa Qatar adalah negara dengan finansial yang cukup baik. Pasca pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya perekonomian Qatar tidak menunjukkan perubahan menurun yang besar, pada 16 Mei 2018 Qatar National Bank melaporkan bahwa surplus transaksi negara itu melebar menjadi 6,4 persen dari PDB pada kuartal keempat sejalan dengan harga minyak yang lebih tinggi sementara defisit neraca keuangan menyempit. Selain itu Pada 13 Mei 2018 Khamis al Mohannadi, seorang pejabat senior dari Kelompok Menteri untuk Dorongan dan Partisipasi Sektor Swasta menyebutkan bahwa penjualan produk Qatar telah meningkat 300 persen pada kuartal pertama 2018 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017

D. Politik Luar Negeri Negara Qatar

Politik qatar terkesan terstruktur lebih positif dimana mempromosikan beberapa strategi yang baru pula. Kemajuan diri merupakan strategi utama Qatar yaitu liberalisasi ekonomi, proyek-proyek luar negeri dan "*state branding*". Strategi ketiga ini mendorong Qatar untuk menjadi negara yang kaya, netral dan visioner serta memancing para investor dan para wisatawan sekaligus juga menjembatani hubungan antara Timur Tengah dan Barat terutama dalam upaya perdamaian. Langkah politik luar negeri Qatar agak tenang jika dibandingkan dengan sikap sebelumnya, yang dapat dikaitkan dengan keinginan Emir muda untuk secara strategis membentuk kebijakan luar negeri Qatar, menggabungkan pendekatan soft dan hard power, sambil mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional yang mendukung kebijakan luar negeri Qatar Qatar adalah negara yang menganut keyakinan Wahhabi dari Salafi, Islam Hanbali. Keluarga yang berkuasa di Qatar berasal dari kelompok suku Arab yang sama (Bani Tamim) sebagai pendiri Wahhabisme, Muhammad bin Abd al-Wahhab dan para pemimpin

Qatar telah lama menganut kitab sucinya. Bahkan di abad ke-21 ketika tidak ada apa pun tentang orientasi atau kebijakan Qatar yang berirama dengan pemahaman khas tentang keyakinan Wahhabi puritan, masjid nasional yang dibuka pada 2012 diberi nama setelah alWahhab sendiri. Meskipun negara secara keseluruhan menerima masuknya Ikhwanul Muslimin, tanah untuk proselitisasi tidak begitu diterima.

E. Hubungan Arab Saudi dan Qatar Sebelum Pemutusan Hubungan Diplomatik

1. Secara Historis

Imam Qatar berasal dari Saudi. Namun, karena ketegangan antara kedua negara meningkat pada 1990-an, Kementerian Wakaf Qatar, kantor negara yang bertanggung jawab atas tugas-tugas masjid memberikan tugas yang lebih menonjol kepada para imam nonSaudi. Kedua negara ini tergabung dalam negara GCC (Gulf Cooperation Council) atau negara-negara di teluk Arab dimana kelompok ini saling bekerjasama antara lain untuk mengelola perbatasan teluk Arab. Namun begitu keanggotaan Arab Saudi dan Qatar di GCC tidak menjadi penghalang bagi kedua negara ini untuk tetap bersaing di perbatasan. Persaingan antara kedua negara ini secara historis dimulai ketika Arab Saudi mengklaim di semenanjung Qatar.

Ada banyak kedekatan budaya antara kedua negara. Banyak orang Badui membawa paspor Arab Saudi dan Qatar. Kedua negara secara resmi adalah penganut Sunni, negara-negara Wahhabi, meskipun Qatar memiliki kebijakan yang lebih ramah terhadap keragaman agama lain dibanding Arab Saudi, yang beberapa orang membandingkan dengan budaya maritim Qatar melawan budaya padang pasir Arab Saudi (Robert, 2012 : 3). Pada tahun 1996, Qatar meluncurkan saluran berita satelit AlJazeera dan membawa merek baru liputan berita ke wilayah tersebut. AlJazeera menggelisahkan para pemimpin Arab dengan isi beritanya yang cenderung

menyudutkan beberapa pihak dan kontroversial, dalam bahasa Arab, tentang kontroversi internal dan regional yang sebelumnya tidak terungkap. Ada beberapa perubahan hubungan yang terjadi pasca pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar. Pasca pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara ini. Selain pemulangan warga negara Qatar oleh Arab Saudi, pelarangan ibadah Haji bagi warga Qatar serta pemblokadean wilayah darat laut udara bagi Qatar di dalam negarapun Qatar menarik peredaran barang-barang buatan Arab Saudi dan negara teluk yang memutuskan hubungan diplomatic dengan Qatar.

Selain itu warga Qatar yang bersekolah di Arab Saudi ikut merasakan imbas dari pemutusan hubungan diplomatik ini karena mahasiswa Qatar yang berada di Arab Saudi ikut dipulangkan ke negara Qatar sebelum menyelesaikan studinya. Kemudian ini menjadi dasar Qatar melaporkan Arab Saudi sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia ke PBB.⁵

2. Secara Persaingan

Persaingan Arab Saudi dan Qatar. Persaingan Arab Saudi dan Qatar secara umum terjadi ketika Qatar menemukan ladang gas terbesar di wilayah perbatasan utara Qatar dan seketika menjadikan Qatar sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Saudi yang merupakan negara yg secara historis lebih awal berkembang dari Qatar terlihat tidak terima karena hegemoni Arab Saudi yang ingin tetap menjadi negara penguasa di kawasan. Salah satu arena persaingan Arab Saudi dan Qatar di kawasan ialah persaingan Saudi dan Qatar di Suriah. Qatar awalnya terlibat dengan masalah yang terkait dengan Suriah dengan mengikuti jejak Arab Saudi. Arab Saudi mengubah pendiriannya dari penyesuaiannya untuk menjatuhkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad pada musim panas 2011, beberapa bulan setelah dimulainya revolusi Suriah, Arab

⁵ Yani, Yanyan Mochamad Yani, *Politik Luar Negeri*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 65-73

Saudi memimpin Qatar untuk juga meninggalkan usahanya untuk menjembatani perbedaan dengan Assad. Namun Qatar dengan cepat mencari jalan indepen untuk masalah ini. Selain itu Persaingan antara Arab Saudi dan Qatar di Suriah adalah dengan berdirinya Free Syrian Army (FSA). Qatar menjadi tuan rumah dalam pembentukan Free Syrian Army (FSA), yang terdiri dari tentara dan petugas yang membelot dari tentara negara Suriah, dan FSA menjadi lengan militer Koalisi Nasional setelah peluncuran terakhir.

Namun, Arab Saudi secara gigih mencoba untuk menggunakan pengaruh yang lebih besar atas FSA, seperti yang digambarkan oleh perubahan dalam kepemimpinan FSA yang terjadi pada bulan Februari 2014 di mana seorang pemimpin pro-Qatar (Salim Idris) diganti dengan yang pro-Saudi yaitu Abdullah al-Bashir (Khatib, 2014 : 9). Selain itu, baru – baru ini pada Awal tahun 2018 Qatar memutuskan untuk mengakuisisi sistem pertahanan udara Russia S-400 yang kemudian menjadi konflik lagi bagi Arab Saudi dimana Arab Saudi menolak keputusan Qatar untuk membeli senjata tersebut karena ditakutkan itu akan menjadi ancaman bagi kawasan, dikabarkan bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menyampaikan keluhannya terhadap keputusan Qatar ini. Namun bagi Qatar keputusan pengakuisisian senjata ini ialah hak Qatar sebagai negara yang berdaulat ⁶

F. Konflik Arab Saudi dan Qatar yang Berujung Pemutusan Hubungan

Sebenarnya secara garis besar penyebab Arab mengeluarkan kebijakan Internasional yaitu memutuskan hubungan diplomatik dengan qatar karena Negara Arab menilai Qatar megingkari komitmennya untuk mengharmoniskan dan mensinergikan

⁶ Sita Hidriyah.2016.Reformasi Ekonomi Arab Saudi.Majalah Badan Keahlian DPR RI.Info Singkat Hubungan Internasional Vol.VIII,No.09/I/P3DI.

kebijakan luar negerinya untuk menjalin hubungan baik dengan Kepentingan Arab Saudi dan negara teluk lain. Dimana negara Qatar yang seharusnya sejalan dengan Negara di Kawasan teluk yaitu memerangi Iran dan kelompok militan atau teroris, dianggap sebaliknya yaitu mendukung hingga membantu secara kongkrit pergerakan dan aktivitas negara Iran serta kelompok militan.

Salah satu yang membuat ketegangan hubungan antara kedua negara ini yang berujung pemutusan hubungan diplomatik adalah adanya sebuah tulisan pada website Qatar News Agency yang menuliskan pidato Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani dalam berita di website tersebut mengatakan Emir Qatar menganggap Iran adalah sebuah kekuatan yang besar dalam stabilisasi kawasan teluk, Emir Qatar memuji negara Iran dan beranggapan Iran merupakan kekuatan penting bagi wilayah teluk, selain itu dalam berita tersebut dikabarkan pula Qatar memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Donald Trump, Presiden USA.

Hal ini tentunya berseberangan dengan Negara Teluk termasuk Arab Saudi, Dimana Negara Teluk yang bersitegang dan kontra dengan Negara Iran, Namun Emir Qatar malah menganggap tindakan melawan Iran bukan suatu hal yang menurutnya bijaksana, Emir Qatar secara jelas berdasar pidatonya mendukung kelompok yang dianggap terorisme yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin, Hamas, Hizbullah dan Israel, Qatar juga dinilai mengkritik kebijakan dan propaganda "anti Iran" yang dimiliki oleh negara di kawasan teluk. Pernyataan-pernyataan tersebut sontak mendapat reaksi cukup keras dari Arab Saudi serta negara-negara yang berada di kawasan teluk lainnya, karena pernyataan Emir Qatar bertentangan dengan nilai-nilai yang dijaga oleh negara di kawasan teluk. Qatar mengeluarkan rilis sikap dan pernyataan sebagai respon atas pergolakan yang terjadi. Qatar bukan melawan meminta maaf atau lainnya, melainkan mengatakan bahwa Berita mengenai pidato Emir Qatar yang dibeitakan itu hoax atau tidak benar. Situs berita Qatar tersebut telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga pidato dari Emir Qatar yang asli dirubah, dimodifikasi dan diarang menjadi palsu dan

menjadi berita bohong, pidato yang diberitakan itu bukan pidato asli dari Emir Qatar. Pemerintah Qatar melalui Kemnluqri akan menyelidiki diretasnya situs media sosial QNA tersebut karena telah mengganggu hubungan diplomatik antara Negara Qatar dengan Negara yang berada dalam Kawasan Teluk termasuk Negara Arab Saudi. Namun Arab Saudi tanpa memperhatikan pembelaan yang dilakukan oleh Qatar langsung memutuskan Hubungan Diplomatik diantara keduanya. Melalui media Saudi, Arab Saudi memberikan pernyataan sebagai berikut : “...*Qatar embraces multiple terrorist and sectarian groups aimed at disturbing stability in the region, including the Muslim Brotherhood, ISIS (Daesh) and Al Qaida.*”. diketahui Arab Saudi beserta Bahrain dan UEA juga pernah menarik duta besar mereka dari negara Qatar atas dasar anggapan dibantunya kelompok-kelompok militan oleh Qatar, Qatar juga mendanai kelompok tersebut.

Setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, Arab Saudi bersama UEA, Bahrain dan Mesir mengeluarkan daftar sejumlah kelompok, tokoh dan institusi yang selama ini mendanai teroris.⁹ Dari daftar tersebut diketahui bahwa sebanyak 18 orang individu dan 5 institusi dari Qatar mendanai teroris. Dari daftar 18 orang individu itu termasuk anggota keluarga kerajaan Qatar yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Qatar, Abdullah bin Khalid Al Thani yang terlibat dalam pendanaan organisasi Al Qaeda. Tuduhan Arab Saudi terhadap Qatar terkait pendanaan terhadap kelompok-kelompok terorisme adalah hal yang mudah dipatahkan dan diperdebatkan. Lewat korespondensi elektronik antara mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan ketua tim kampanye kepresidenan Hillary pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, John Podesta, yang dibocorkan oleh WikiLeaks, Qatar dan Arab Saudi disinggung sebagai pihak yang sama-sama memberikan dukungan keuangan dan logistik secara sembunyi-sembunyi kepada ISIS dan kelompok Sunni radikal lain di kawasan Teluk. Kemudian Arab Saudi sendiri merupakan pendukung milisi bersenjata yang saat ini memberontak di Suriah. Arab Saudi juga,

dengan paham Wahabi yang mereka miliki, dianggap punya peran besar dalam menyebarkan ideologi terorisme ke sejumlah negara.

Secara Diplomati Awalnya konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar hanya mencakup di wilayah perbatasan negara, namun baru-baru ini di bawah kepemimpinan Emir Qatar yang baru konflik besar antara Arab Saudi dan Qatar mengeruak dikarenakan kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar yang dianggap Arab Saudi banyak menyeleweng dari perjanjian GCC yang sepakat untuk setiap anggota menyelaraskan kebijakan politik luar negerinya demi kepentingan bersama di kawasan. Selain itu hubungan antara kedua negara itu memburuk di bawah mantan Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Raja Saudi dua kali mendukung upaya kudeta terhadap emir Qatar pada tahun 1996 dan 2005, dan semakin melihat Qatar sebagai saingan kekuatan dalam politik regional dan global. Gejolak Teluk Arab di Qatar memuncak menjadi kemarahan terbuka pada 2011, ketika Qatar dengan cepat merangkul pemberontakan pada masa Arab Spring, khususnya di Mesir, Libya, dan Suriah. Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang melihat salah seorang dari mereka, Mohammed Morsi, secara singkat berhasil menggantikan Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa. Untuk bagiannya, Arab Saudi pergi ke belakang militer Mesir, yang menggulingkan Morsi hanya setahun setelah ia terpilih. Pada bulan Maret 2014, Arab Saudi, bersama dengan Bahrain dan UEA, menarik duta besarnya dari Qatar, mengklaim bahwa Qatar gagal melaksanakan persetujuan Gulf CoOrdination Council (GCC) pada bulan November 2013 untuk tidak mendukung kelompok yang mengancam GCC. Arab Saudi menyerukan kepada Emir baru Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dengan ultimatum untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri Qatar dengan negara-negara GCC lainnya. Secara khusus, Arab Saudi mencari perubahan dalam dukungan Qatar untuk Ikhwanul Muslimin, yang dekat hubungan dengan Turki, penentangannya terhadap rezim baru di Mesir, dan dukungannya bagi pemberontak Houthi di Yaman. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2018 Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan

diplomatik dengan Qatar, yang dinilai Arab Saudi sebagai upaya bagi menjaga keamanan Nasional Arab Saudi yang menuduh bahwa Qatar ada dibalik dari kelompok-kelompok ekstrimisme yang dapat menjaga kestabilan negara dan kawasan. Selain itu Saudi juga berusaha untuk memperlihatkan keburukan-keburukan Qatar di negaranegara barat dan berharap negara Barat akan ikut menekan negara Qatar serta mengubah opini publik tentang Qatar ⁷

Selain itu Pada tanggal 23 November 2012 anggota GCC menandatangani perjanjian untuk tidak memberikan dukungan kepada pihak manapun yang mengancam keamanan dan stabilitas negara-negara anggota GCC baik sebagai kelompok atau individu melalui kerja keamanan langsung atau melalui pengaruh politik dan tidak mendukung media yang bermusuhan. Qatar sebagai salah satu negara yang termasuk kedalam GCC ini ikut menandatangani perjanjian tersebut, namun terdapat kebijakan yang di jalankan oleh Qatar membuat negaranegara GCC lainnya menilai Qatar sebagai negara yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada tanggal 5 Maret 2013, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menarik duta besar mereka dari Qatar dikarenakan Qatar dinilai telah mendukung kelompok dan individu yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan dan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar serta menutup semua akses perbatasan dengan Qatar

Terdapat beberapa alasan yang dimiliki Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar, yaitu salah satunya ialah dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin. Tekanan Arab Saudi terhadap Qatar semakin meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Maret 2014, ketika Arab Saudi memimpin dua negara Teluk lainnya, Bahrain dan Uni Emirat Arab, dalam menarik duta besar mereka dari Qatar, menyebabkan malu publik bagi Qatar. Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan

⁷ Ardison Muhammad.2010.Iran, Sejarah Persia & lompatan Masa Depan Negeri Kaum Mullah. Surabaya:Penerbit Liris (dalam) jurnal Ahmad Sahide, Konflik

meminta negara-negara Eropa untuk ikut menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris. Dan pada bulan Agustus 2014, setelah pengambilalihan oleh brigade Islam yang didukung oleh Qatar dari bandara nasional Libya di Tripoli, Uni Emirat Arab melakukan serangan udara terhadap milisi tersebut. Sementara itu, Arab Saudi mengirim delegasi ke Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab untuk mencoba menyelesaikan ketegangan dengan Qatar dengan pandangan mendorong Qatar untuk menerima "aksi bersama" di Teluk

G. Bentuk Pemutusan Hubungan Diplomatik

Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan menutup perbatasan dengan Qatar baik jalur darat, laut dan udara. Lalu Arab Saudi memulangkanwarga negara Qatar dari wilayahnya dan menarik duta besar mereka yang berada di Qatar. Arab Saudi juga melakukan embargo terhadap penerbangan Qatar yaitu Qatar Airways. Penerbangan dari Arab Saudi seperti AirArabian, Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways menanggihkan penerbangan mereka ke dan dari Qatar. Qatar terpaksa mengalihkan penerbangan mereka ke Afrika dan Eropa melalui Iran. Penerbangan di Iran melonjak menjadi 100 sampai 150 penerbangan setiap hari. Kemudian Arab Saudi memutuskan hubungan militer dengan Qatar dalam konflik Yaman. Terakhir Arab Saudi menutup kantor berita lokal Al Jazeera yang berada dinegaranya. Selain itu izin operasi media Al Jazeera pun dicabut oleh pemerintah Arab Saudi.

Pasca pemutusan hubungan diplomatik, Arab Saudi bersama Bahrain dan UEA yang juga melakukan pemutusan hubungan diplomatik mengeluarkan 13 tuntutan kepada Qatar jika negara itu ingin mengakhiri krisis hubungan diplomatik yang tengah terjadi. Tuntutan yang diajukan antara lain untuk menutup stasiun TV Al Jazeera dan stasiun afiliasinya; menutup pangkalan militer Turki di Qatar; menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Iran dan sebagiannya. Qatar mengambil sikap yang tegas dengan menolak

memenuhi setiap butir tuntutan yang diajukan kepada mereka karena telah mengganggu kedaulatan Qatar sebagai negara merdeka. Arab Saudi secara terang-terangan seolah mendikte urusan politik luar negeri Qatar menjadi seperti yang mereka inginkan, karena itu hingga saat ini krisis hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi serta negara-negara disekitarnya masih terus berlangsung.

H. Respon Qatar Terhadap Pemutusan Hubungan Diplomatik Pasca dilakukannya pemutusan hubungan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar

Kementerian Luar Negeri Qatar menanggapi fenomena tersebut dengan mengatakan bahwa "tidak ada pembenaran yang sah" untuk tindakan yang dilakukan oleh empat negara tersebut yang telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemerintah Qatar menganggap bahwa keputusan itu adalah "pelanggaran kedaulatannya". Qatar telah berulang kali menolak tuduhan memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok radikal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah dan menganggap tuduhan tersebut sebagai "tuduhan yang tidak berdasar". Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed al-Attiyah mengatakan Qatar bukan negara yang mudah ditekan oleh negara manapun. Menurut Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed al-Attiyah rakyat Qatar siap untuk membela negaranya dan mengharapkan agar krisis antara negara-negara teluk ini tidak sampai dilakukannya intervensi militer pada 1 September 2018).

Baik Emir dan Menteri Luar Negeri Qatar telah menegaskan kembali bahwa Qatar bersedia bernegosiasi dengan negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik tersebut, dan telah memenuhi panggilan dari para pemimpin internasional untuk dialog. Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya yang telah memutuskan hubungan dengan Qatar dan tidak lama setelah

pengumuman pemutusan hubungan Arab Saudi kepada Qatar, Arab Saudi mengeluarkan 13 poin daftar tuntutan untuk mengakhiri krisis antara negara-negara Teluk, dan tetap bersikeras untuk menuntut Qatar agar dapat menutup jaringan Al Jazeera, menutup pangkalan militer Turki dan mengurangi hubungan dengan Iran. Dalam daftar 13-point, negaranegara juga menuntut agar Qatar memutuskan semua hubungan yang dituduhkan dengan Ikhwanul Muslimin dan dengan kelompokkelompok lain, termasuk Hizbullah, alQaeda dan ISIL (juga dikenal sebagai ISIS). Negara-negara itu sekarang memberi Qatar 10 hari untuk mematuhi semua tuntutan, yang juga termasuk membayar jumlah kompensasi yang tidak ditentukan untuk apa yang negara-negara tersebut klaim sebagai ganti kerugian korban jiwa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyatakan bahwa daftar 13 tuntutan tidak dapat diterima oleh Qatar telah mengirim surat tanggapan terhadap daftar permintaan dari Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab.

Alih-alih mengikuti persyaratan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi kepada Qatar, Qatar malah membuka hubungan dengan wilayah barat dimana ini bertujuan untuk menyaring dukungan bagi Qatar. 13 tuntutan yang dikeluarkan Arab Saudi itu jelas dilakukan Arab Saudi untu menekan Qatar, menjadikan Qmatar sebagai negara yang tetap berada di bawah Arab Saudi dan UAE serta negara teluk lainnya. Pejabat senior pengelola kawasan Teluk yang ikut terlibat dalam krisis ini bahkan mengatakan bahwa keputusan pemblokiran Qatar ini tidak yakin akan membuat Qatar patuh dan merubah kebijakankebijakan politik luar negerinya untuk selaras dengan Arab Saudi dan negara teluk lainnya Selain itu Qatar juga dinilai berhasil melakukan politik publik dan memenangkan opini publik sejauh ini para warga yang tinggal di Timur Tengah menilai bahwa keputusan pemutusan hubungan diplomatic oleh Arab Saudi kepada Qatar dan tuduhantuduhan Arab Saudi yang dijadikan dasar pemutusan hubungan diplomatik dinilai sebagai konspirasi otokratis melawan

aspirasi untuk perubahan politik yang secara konsisten mereka perjuangkan sejak Arab Springs di tahun 2011

I. Upaya Pemulihan Hubungan Kedua Negara

Ada beberapa negara yang menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam krisis diplomatik Arab Saudi dan Qatar ini salah satunya ialah Amerika Serikat, Russia, Prancis, dan Kuwait. Dalam hal ini, Kuwait berusaha menjadi mediator dalam krisis diplomatik yang saat ini tengah terjadi antara Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Krisis diplomatik ini merupakan yang terburuk di kawasan Timur Tengah sejak perang Amerika Serikat (AS) dengan Irak pada 1991 Adapun hasil dari Kuwait yang bersedia menjadi penengah dalam konflik ini ialah dimana Arab Saudi memberikan 13 daftar yang menjadi syarat jika ingin menjalin hubungan diplomatik kembali, daftar tuntutan itu dibawa Emir Kuwait dan diberikan kepada Emir Qatar.

Daftar tuntutan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab untuk Qatar sebagai upaya pemulihan hubungan diplomatiknya adalah :

- 1) Arab Saudi dan negara – negara teluk yang memiutuskan hubungan diplomatic dengan Qatar meminta Qatar untuk menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran baik itu hubungan kerjasama atau apapun yang berhubungan dengan Iran Qatar harus menghentikan semua kegiatan dengan Iran, selain itu Qatar juga harus menutup misi diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Pengawal Revolusi Iran dan memutus kerja sama militer dan intelijen dengan Iran. Perdagangan dengan Iran harus mematuhi sanksi AS dan internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk.
- 2) Arab Saudi meminta Qatar untuk segera menutup pangkalan militer Turki yang saat ini sedang dibangun di Qatar serta menghentikan kerja sama militer dengan Turki.

- 3) Qatar harus memutuskan hubungan dengan semua organisasi atau kelompok ekstrimis, sektarian dan ideologis, khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIL, al-Qaeda, Fateh al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra) dan Hizbullah Lebanon. Serta secara resmi harus menyatakan entitas ini sebagai kelompok teror sesuai daftar yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, dan setuju dengan semua pembaruan daftar ini di masa mendatang.
- 4) Qatar harus menghentikan semua sarana pendanaan untuk individu, kelompok atau organisasi yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain, AS dan negara lainnya yang dianggap dapat mengancam keamanan Internasional khususnya kawasan Timur Tengah.
- 5) Menyerahkan (tersangka teroris) buron dan individu yang dicari dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain ke negara asal mereka. membekukan aset mereka, dan berikan informasi yang diinginkan tentang tempat tinggal, pergerakan, dan keuangan mereka kepada Arab Saudi. Hal ini diminta Arab Saudi dan Negara tetangganya untuk meminimalisir dan mengeliminasi teroris di kawasan.
- 6) Qatar harus menutup jaringan berita Al Jazeera beserta stasiun afiliasinya atau apapun yang terkait dengan Al Jazeera. Dimana diketahui bahwa jaringan berita Al Jazeera sering kali memuat berita yang menyudutkan Arab Saudi yang juga ini menjadi salah satu ketidak sukaan Arab Saudi kepada Qatar, karena Al Jazeera adalah salah satu jaringan berita yang ikut didanai langsung oleh pemerintah Qatar.
- 7) Qatar harus mengakhiri gangguan dalam urusan internal negara-negara yang berdaulat. Dalam kata lain Arab Saudi menginginkan Qatar untuk berhenti ikut campur dalam urusan konflik di timur tengah. Qatar juga harus berhenti memberikan kewarganegaraan kepada warga negara yang berpotensi dan diinginkan dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Mencabut kewarganegaraan Qatar untuk warga negara di mana

kewarganegaraan tersebut melanggar hukum negara-negara tersebut.

- 8) Qatar harus membayar ganti rugi untuk reparasi dan kompensasi untuk korban jiwa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya akan ditentukan dan dikoordinasikan dengan Qatar.
- 9) Menyelaraskan kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi Qatar dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya, serta pada masalah ekonomi, sesuai kesepakatan 2014 yang dicapai dengan Arab Saudi. Dimana perjanjian ekonomi ini salah satunya adalah dalam pengelolaan gas alam Qatar yang diinginkan Arab Saudi agar Qatar membagi pengelolaan gas alam ini dengan negara GCC bukan dengan negara yang tidak dikehendaki oleh Arab Saudi seperti Iran.
- 10) Qatar harus menghentikan kontak dengan oposisi politik di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain. Arab Saudi juga meminta Qatar untuk menyerahkan file yang menjabarkan kontak sebelumnya dengan dukungan untuk kelompok oposisi, dan kirimkan rincian informasi kelompok oposisi yang didukung Qatar informasi ini berupa informasi pribadi mereka serta informasi tentang apa saja daftar dukungan yang diberikan Qatar kepada kelompok oposisi tersebut.
- 11) Tutup semua outlet berita yang didanai langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby, Al Jadeed, Mekameleen dan Middle East Eye, dan kantor berita lainnya. Karena Arab Saudi menganggap berita-berita yang dimuat oleh kantor berita tersebut terlalu menyudutkan Arab Saudi dan membuat keresahan bagi warga negara yang tinggal di kawasan Timur Tengah.
- 12) Qatar harus setuju dengan semua permintaan yang diberikan oleh Arab Saudi dan negara teluk lain yang ikut memutuskan hubungan dengan Qatar dalam tenggat waktu yang ditentukan yaitu 10 hari sejak daftar ini diterima Qatar, atau penawaran itu menjadi tidak berlaku.

13) Qatar harus menyetujui untuk melakukan tinjauan kepatuhan setiap bulan pada tahun pertama setelah tuntutan itu disetujui, diikuti oleh tinjauan setiap tiga bulan pada tahun kedua, dan audit tahunan dalam 10 tahun berikutnya (Dapat kita lihat bahwa 13 tuntutan diatas sangat menyudutkan Qatar, maka dari itu Qatar sulit menerima sehingga proses rekonsiliasi hubungan Arab Saudi dan Qatar menjadi lebih alot dan Nampak sulit untuk diwujudkan. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan tidak akan ada negosiasi atas daftar tuntutan yang telah diajukan kerajaan Arab Saudi dan sekutusekutunya kepada Qatar untuk mengakhiri krisis regional utama.

III. SIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri dalam hukum internasional hubungan antar negara tidak selamanya berjalan baik atau harmonis kadangkala akan memanas dan menimbulkan sengketa internasional antara keduabelah pihak, seperti yang terjadi pada Arab Saudi dengan Qatar. Negara Arab Saudi merupakan negara Islam yang berada di Asia Timur bagian tengah yang termasuk negara kawasan Teluk. Terletak di Semenanjung Arab di antara Laut Merah di sebelah barat (1.760 km) dan Teluk Arab di sebelah timur (560 km). Negara ini terkenal dan sukses berkat minyak hingga dijuluki negara petrodolar sebagai negara Islam tentunya politik luar negeri negara Arab Saudi berkaitan erat dengan Islam. Kebijakan yang diambil tentu berdasarkan dengan berpedoman kepada hukum-hukum Islam. Sedangkan Negara Qatar juga merupakan negara Islam yang masuk dunia Islam sejak Rajanya, Al-Munzir Ibnu Sawi Al-Tamimi memeluk Islam pada abad ke-7 angkatan laut Qatar merupakan armada yang paling hebat yang digunakan untuk mengangkut tentara ke berbagai wilayah. Kemerdekaan Qatar diberikan Inggris pada tanggal 3 September 1971 Politik Qatar terkesan terstruktur lebih positif dimana mempromosikan beberapa strategi yang baru pula. Kemajuan diri merupakan strategi utama Qatar yaitu liberalisasi ekonomi, Sejarah

Persetujuan kedua negara ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pada dasarnya kedua negara ini sudah memiliki hubungan internasional sejak abad 19 silam dimana secara historis dahulu kala imam qatar pernah ada yang berasal dari saudi namun karena ketegangan antara kedua negara meningkat pada 1990an, kementerian wakaf qatar seperti mengabaikan imam saudi tersebut. Ketegangan antara kedua belah negara ini juga sudah berawal dari bertahun-tahun lalu. Dimana pada tahun 1995. konflik antara Arab Saudi dengan Qatar dimulai dengan ditandai naiknya Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai Emir Qatar yang mengukuhkan posisi emir sebelumnya yang dikenal dekat dengan Arab Saudi. Semenjak itu hubungan diantara keduanya terus memanas. Konflik dan persengketaan diantara keduanya kembali muncul, persengketaan tersebut berujung pada pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab saudi terhadap Qatar. Berbagai penyebab yang melatarbelakanginya secara umum dikarenakan anggapan arab saudi terhadap Qatar yang terkesan dekat dengan iran dan mendukung serta membantu kelompok militan, hal tersebut dianggap sikap yang tidak menjaga hubungan baiknya dengan negara yang ada diwilayah teluk termasuk arab dengan tidak menghormati sikap negara-negara tersebut. Sikap berupa anti iran dan anti kelompok militan tersebut oleh Qatar malah dikritik melalui pernyataan emir Qatar yang dilansir oleh QNA. Namun kemudian Qatar membantah dan berargumen bahwa QNA diretas lebih jelasnya adalah Gejolak Teluk Arab di Qatar memuncak menjadi kemarahan terbuka pada 2011, ketika Qatar dengan cepat merangkul pemberontakan pada masa Arab Spring, khususnya di Mesir, Libya, dan Suriah. Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang melihat salah seorang dari mereka, Mohammed Morsi, secara singkat berhasil menggantikan Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa. Untuk bagiannya, Arab Saudi pergi ke belakang militer Mesir, yang menggulingkan Morsi hanya setahun setelah ia terpilih . Pada bulan Maret 2014, Arab Saudi, bersama dengan Bahrain dan UEA, menarik duta besarnya dari Qatar, mengklaim bahwa Qatar gagal melaksanakan persetujuan

Gulf CoOrdination Council (GCC) pada bulan November 2013 untuk tidak mendukung kelompok yang mengancam GCC.

Bentuk keputusan Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab berupa menutup berbagai perbatasan negara Arab dengan Qatar, melakukan embargo diberbagai bidang termasuk dalam bidang transportasi yaitu jalur penerbangan, mendeportasi warga negara Qatar dari negaranya serta yang terakhir dalam bidang komunikasi menutup media Al Jazeera di negaranya.

Pada dasarnya Qatar tidak berharap hal tersebut terjadi karena menurut Qatar anggapan-anggapan negara Arab sesungguhnya tidak berdasar dan tidak sesuai kenyataan dan menerima penyelesaian berupa mediasi atau negosiasi, hal ini disambut dengan Arab dengan mengeluarkan 13 tuntutan jika negara Qatar ingin berdamai maka tuntutan tersebut harus dipenuhi, kemudian Qatar meresponnya dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyatakan bahwa daftar 13 tuntutan tidak dapat diterima oleh Qatar telah mengirim surat tanggapan terhadap daftar permintaan dari Arab Saudi Qatar malah membuka hubungan dengan wilayah Barat dimana ini bertujuan untuk menyaring dukungan bagi Qatar. Bagi Qatar 13 tuntutan yang dikeluarkan Arab Saudi itu jelas dilakukan Arab Saudi untuk menekan Qatar, menjadikan Qatar sebagai negara yang tetap berada di bawah Arab Saudi dan UAE serta negara Teluk lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak juga terdapat beberapa negara yang menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam krisis diplomatik Arab Saudi dan Qatar ini salah satunya ialah Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan Kuwait. Dalam hal ini, Kuwait berusaha menjadi mediator dalam krisis diplomatik yang saat ini tengah terjadi antara Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Namun tetap saja rekonsiliasi Arab Saudi dengan Qatar jauh dari yang diharapkan.

REFERENSI

- Adolf, H. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardison, M. (2010). *Iran, Sejarah Persia & lompatan Masa Depan Negeri Kaum Mullah*. Surabaya: Penerbit Liris.
- Hidriyah, S. (2016). Reformasi Ekonomi Arab Saudi. *Majalah Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Hubungan Internasional*, 8. Vol. VIII No.09/I/P3DI.
- John G. (1991). *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge University Press
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.
- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

